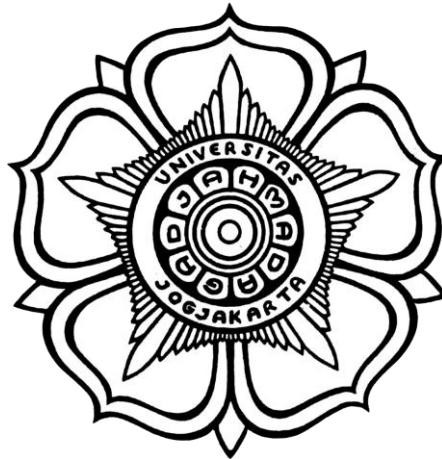


**PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM MENINGKATKAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN PERBATASAN**



ERMI SUHASTI SYAFEI

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: ermi.syafei@uin-suka.ac.id**

**Dipresentasikan pada Konggres Pancasila ke-VII
di Balairung UGM Yogyakarta
1 Juni 2015**

PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KAWASAN PERBATASAN ¹

Ermi Suhasti S.²

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta
ermi.suhasti@yahoo.co.id

Abstrak

Problem yang dihadapi masyarakat kawasan perbatasan di Indonesia, antara lain dimulai dari kemiskinan, minimnya infrastruktur, lunturnya nasionalisme, sampai rendahnya kualitas sumber daya manusia, perlu menjadi perhatian utama pemerintah maupun bangsa Indonesia. Hal inipun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM-Nasional 2004-2009, yang telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Problem tersebut disebabkan oleh perubahan yang terjadi terus menerus sebagai konsekwensi arus pergaulan global yang dapat mengikis nilai-nilai Pancasila. Kondisi rendahnya sumber daya manusia (SDM) ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Demikian pula beberapa masyarakat kawasan perbatasan terutama pemudanya yang bekerja di Malasya, Singapore, Filipina, Vietnam dan Australia, yang bekerja hanya sebagai buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya, yang jelas-jelas menggambarkan rendahnya kualitas SDM pada umumnya. Namun tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan saat ini untuk menjadi lebih baik. Untuk itu tulisan ini mencoba mengkaji problematika dan solusi masyarakat di kawasan perbatasan terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia yang rendah. Strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan. Harapannya bahwa pendidikan karakter berbasis peningkatan wawasan kebangsaan akan menumbuhkan nasionalisme warga perbatasan khususnya para pemuda untuk lebih mencintai negaranya sendiri.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pemuda, Sumber Daya Manusia, Kawasan Perbatasan, Pembudayaan.*

Pendahuluan

¹ Dipresentasikan pada Konggres Pancasila ke-VII, 1 Juni 2015, di UGM Yogyakarta

² Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi di kawasan perbatasan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, karena masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi seperti prasarana dan sarana komunikasi, misal pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan makin tertinggal dalam segala bidang, sehingga memberikan dampak yang luar biasa bagi pemerintah Indonesia dikarenakan kesenjangan tingkat ekonomi dan pendidikan. Sebaliknya jika daerah perbatasan dikelola dengan baik, ekonomi dan pendidikan berkembang baik maka wilayah ini akan menjadi sentra bisnis atau menjadi tempat wisata yang baru sehingga secara langsung bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Sebagai dampak minimnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang negaranya sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbatasnya sarana dan prasarana akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada menyebabkan masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya. Rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta keterampilan masyarakat merupakan salah satu faktor utama rendahnya kualitas SDM yang menghambat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan, sehingga akan sulit untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.

Kondisi kawasan wilayah perbatasan yang sangat memprihatinkan dapat dilihat dari beberapa aspek³. *Pertama*, aspek ideologi. Akses informasi dari

³ Eddy Sianturi, dan Nafsiah, SP, 2006, *Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI*. <http://www.kemhan.go.id/kemhan/> halaman 3, akses 3 April 2015

pemerintah pusat maupun daerah sangat minim, sebaliknya akses informasi dari negara tetangga sangat mudah diperoleh. Sehingga ideologi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan sangat mirip dengan ideologi negara tetangga. Pengaruh ideologi negara tetangga yang dipahami oleh masyarakat bisa mengancam keutuhan NKRI.

Kedua, aspek politik, Kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan biasanya dipengaruhi oleh aktifitas negara tetangga. Hal ini dapat mengundang kerawanan dibidang politik. Kondisi ekonomi, pendidikan dan keamanan masyarakat wilayah perbatasan di Indonesia pada umumnya sangat memprihatinkan dikarenakan letaknya yang terisolir dan tidak mendapat akses sehingga kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan pembangunan menghiasi pemandangan di wilayah perbatasan.

Ketiga, aspek sosial budaya. Masyarakat wilayah perbatasan sangat mengerti dengan budaya Negara tetangga dari pada budaya bangsa Indonesia. Masyarakatnya bahkan sudah mulai mengadopsi dalam bentuk perilaku, karena budaya asing lebih mudah untuk diakses dari pada budaya sendiri. Ada informasi bahwa produk Malaysia lebih terjangkau dari pada produk Indonesia, masyarakat wilayah perbatasan di suatu daerah di Indonesia lebih hafal lagu kebangsaan Negara tetangga dari pada lagu Indonesia Raya.

Langkah kongkrit pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membangun wilayah perbatasan terutama membangun manusianya belum tampak. Padahal manusia merupakan faktor utama untuk mendukung pembangunan. Oleh karena itu pembangunan manusia dalam perspektif pembangunan pemuda merupakan salah satu cara untuk membantu mempercepat kemajuan masyarakat di kawasan perbatasan.

Masa pemuda merupakan masa/usia yang produktif dimana pada usia tersebut pemuda berada diantara dua kelemahan manusia yakni masa balita dan masa

tua (pikun).⁴ Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Pemuda merupakan pemimpin masa depan. Sumber daya pemuda merupakan sumber daya yang sangat penting. Pada usia yang sangat produktif energi pemuda dapat menghasilkan banyak karya dan karsa sehingga apa yang dibutuhkan oleh perkembangan zaman ada pada pemuda. Masa pembentukan karakter suatu bangsa dimulai dari pemuda, sehingga bagaimana pemuda hari ini sangat menentukan seperti apa mereka di masa depan.

Pemuda memiliki sifat dan karakter dasar yaitu, memiliki identitas ego yang stabil, dapat berfikir secara sistematis, memiliki minat tertentu, mampu menyesuaikan dengan nilai, norma dan harapan masyarakat, perkembangan moralnya mencapai tahap konvensional, terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan di lingkungan serta secara umum diakui keberadaan dan eksistensinya dalam program pembangunan kemasyarakatan. Selain itu pemuda juga memiliki ciri khas dengan kebiasaan yang aktif, energik dalam kegiatan masyarakat yang merupakan manifestasi dari sifat energik, original, spontan dan ideal.

Salah satu langkah yang paling efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan adalah memberdayakan pemuda di kawasan perbatasan dan memberdayakan pengajar muda “Indonesia Mengajar”, yang mempunyai karakter aktif dan energik dalam kegiatan masyarakat. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada pemuda akan meningkatkan SDM di kawasan perbatasan secara signifikan. Karakter dan potensi positif yang ada pada pemuda, seperti kebaikan dan sifat membangun bangsa harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat jika menginginkan masa depan dikelola oleh orang-orang yang berkualitas. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan strategi meningkatkan

⁴ Qardhawi, Yusuf, 1997, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*, (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh), Surakarta: Citra Islami Press, 1997.

kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan dengan memberdayakan pemuda.

Kerangka Teori

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Istilah Pemberdayaan ini muncul dikarenakan adanya kegagalan-kegagalan yang dialami dalam proses dan pelaksanaan pembangunan yang cenderung sentralistis seperti *community development* atau pengembangan komunitas. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. *The Welfare Approach*. Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memberdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat. Kemandirian pemuda dalam ekonomi dan politik merupakan upaya yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu pendekatan ini menjadi sesuatu yang mutlak untuk mempermudah pembangunan kawasan secara umum, khususnya kawasan perbatasan.
2. *The Development Approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Infrastruktur penunjang pembangunan merupakan instrument inti dalam pembangunan manusia secara umum. Pendekatan ini melihat pembangunan infrastruktur sebagai unsur pokok dalam menuju kemandirian masyarakat kawasan perbatasan.
3. *The Empowerment Approach*. Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha untuk memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri tanpa menunggu dan tergantung dengan pihak lain. Selain menciptakan peluang dan memotivasi

masyarakat perlu pemberdayaan dengan konsep yang sesuai dengan lokalitas suatu kawasan khususnya kawasan perbatasan.

Pemberdayaan Pemuda dan Sumber Daya Manusia

Proses pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase, yaitu:

- 1) *Fase Inisiasi* adalah bahwa semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, dan masyarakat khususnya pemuda atau pengajar muda “IM” hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah. Dalam fase ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyodorkan program-program strategis kepada masyarakat khususnya pemuda. Kemudian masyarakat khususnya pemuda hanya menjalankan apa yang telah diprogramkan pemerintah. Model ini memiliki kelebihan yang mana masyarakat tidak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan. Namun model ini juga memiliki kelemahan yang mana program pemerintah tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat kawasan perbatasan.
- 2) *Fase Partisipatoris* adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat khususnya pemuda sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Sehingga peluang keberhasilan program ini akan lebih besar karena masyarakat lebih awal telah dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan secara psikologis bisa diterima dan diselesaikan secara bersama-sama.
- 3) *Fase Emansipatoris* adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatoris ini masyarakat khususnya pemuda sudah dapat menemukan

kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri (*fase emansipatoris*).⁵

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber Daya Manusia atau *man power*, di singkat SDM dimiliki setiap manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelligence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).⁶

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka. Sumber data adalah dokumentasi yang berkaitan dengan kondisi kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu menjelaskan dan menganalisis kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan. Pendekatan yang

⁵ Moelyarto, V., dan A.M.W. Pranarka. 1996. "Pemberdayaan (*Empowerment*).” Dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, eds. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, hal. 106.

⁶ Malayu Hasibuan, S.P, 2005, *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta : Bumi Aksara Publisher, hal. 244.

digunakan adalah pendekatan sosial berdasarkan Teori Elliot “*The development approach*”. pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif yaitu penalaran yang berawal dari data pada pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda yang berjiwa pancasila di kawasan perbatasan.

Strategi Pemberdayaan Pemuda Menuju SDM Yang Berkualitas

Kelompok pemuda mudah dipengaruhi Gerakan radikal dan berbagai kriminalitas sosial, sehingga pembudayaan nilai-nilai Pancasila ke kelompok pemuda perlu dilakukan. Pembudayaan Pancasila perlu dilakukan agar nilai-nilai Pancasila masuk ke ruang-ruang budaya sehingga Pancasila dapat menjadi pijakan nilai berbangsa bernegara yang bersifat *omni-present* atau senantiasa hadir dimana saja.

Pembudayaan Pancasila juga diperlukan untuk menghindari politisasi Pancasila oleh penguasa. Sejarah bangsa mencatat, Pancasila pernah dijadikan penguasa sebagai alat ideologi untuk melanggengkan kekuasaan. Seorang Pancasilais dipersempit maknanya sebagai orang yang patuh terhadap penguasa. Pancasila hanya alat ideologi penguasa untuk mendisiplinkan rakyatnya. Bangsa Indonesia pernah mengalami fase dimana orang yang melawan pemerintah seringkali dicap sebagai anti-Pancasila. Dampak yang muncul dengan menjadikan Pancasila sebagai alat ideologi kekuasaan penguasa, ketika penguasa itu tumbang, Pancasila pun tidak lagi dijadikan pedoman.

Dengan demikian, diharapkan strategi internalisasi Pancasila dengan melakukan pembudayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat merasuk ke dalam tindakan berbangsa bernegara. Pembudayaan Pancasila penting dilakukan di seluruh komponen masyarakat, terutama di lingkungan pemuda. Pembudayaan Pancasila diyakini tidak hanya dapat menekan gerakan radikalisme dan kriminalitas

di tingkat pemuda, tapi akan menciptakan budaya berbangsa dan bernegara yang luhur.⁷

Secara umum pemberdayaan pemuda di kawasan perbatasan menuju masyarakat kawasan perbatasan yang berkualitas harus memiliki kerangka dan konsep yang jelas. Semua pihak harus dilibatkan dan melibatkan diri baik itu dari masyarakat, pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan pemuda di kawasan yang bersangkutan. Kerangka dan konsep yang jelas akan memudahkan untuk melakukan tindakan secara sistematis dan terarah sehingga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu pemberdayaan pemuda yang meningkatkan sumber daya manusia kawasan perbatasan menjadi fokus utama kajian ini. Pemuda bersinergi dengan pemerintah, masyarakat dan swasta harus menuntaskan berbagai macam persoalan besar bagi masyarakat perbatasan, yakni masalah pendidikan, kesehatan dan kemiskinan yang menjadi masalah pokok masyarakat perbatasan. Masyarakat perbatasan belum siap untuk hidup berdampingan dengan Negara tetangga yang akhirnya memberikan efek negative bagi bangsa Indonesia terutama permasalahan dalam bidang keamanan, ekonomi perbatasan, batas wilayah dan sebagainya.

Pemberdayaan pemuda menjadi fokus utama untuk membangun masyarakat secara umum dan utuh. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membangun sumber daya manusia melalui pendekatan pendekatan sebagai berikut, yaitu:

1. Membangun Kebutuhan Dasar, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

⁷ Sudjito, Gatot, 2015, "Sosialisasi empat pilar di SMAN 1 Karang, Trenggalek, Jawa Timur pada 10/04/2015," (<http://gagasanindonesia.com/gatot-saatnya-melakukan-pembudayaan-pancasila.html>) diunduh tanggal 12 April 2015.

Pemerintah berusaha segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan masyarakat (individu atau keluarga), seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan bagi masyarakat merupakan pendekatan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna. Infrastruktur jalan yang baik serta listrik yang mencukupi akan memberikan ruang dan kemudahan bagi masyarakat untuk berkarya. Pembangunan infrastruktur disertai dengan pelayanan kesehatan.

Penyelesaian persoalan masyarakat bawah (*grassroot*) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan atas bawah (*top-down approach*), melainkan membutuhkan pendekatan bawah atas (*bottom-up approach*). Pemerintah menyediakan prasarana dan fasilitas yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. Permasalahan selama ini masyarakat tidak memiliki ruang untuk mendayagunakan kemampuan mereka sehingga potensi mereka menjadi sia-sia karena tidak didukung oleh fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur jalan, listrik akan memberikan ruang kreatifitas bagi pemuda ditambah lagi dengan keterampilan yang telah diberikan kepada pemuda, jika tidak diiringi dengan pendekatan pembangunan seperti di atas akan menyebabkan pelatihan dan pendidikan bagi pemuda menjadi sia-sia.

2. *Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pemuda Kawasan Perbatasan.*

Strategi pemberdayaan pemuda melalui pendekatan kesejahteraan akan menitik beratkan kepada kesejahteraan ekonomi pemuda. Maksudnya kemapanan ekonomi yang berdampak kepada kesejahteraan akan memberikan efek dan kekuatan bagi pembangunan kawasan perbatasan secara umum. Temuan di lapangan menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa permasalahan kemiskinan menjadi isu utama dan hiasan yang melekat pada masyarakat perbatasan ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Pemuda di kawasan perbatasan dengan penghasilan yang minim dan dengan profesi yang rata-rata nelayan, petani, atau buruh. Dengan hasil panen yang sedikit tapi energy yang besar dikeluarkan membuat kondisi ekonomi pemuda perbatasan semakin menambah deretan panjang permasalahan kemiskinan di kawasan perbatasan. Dalam hal ini peran yang dominan seharusnya dimainkan pemerintah untuk mengupayakan dan menciptakan peluang-peluang sehingga para pemuda di kawasan perbatasan bisa meningkat taraf hidupnya. Kemiskinan yang melanda mereka hari ini mengakibatkan para pemuda tidak memikirkan pembangunan kawasan secara komprehensif, namun mereka berfikir sangat pragmatis. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.

3. Memberdayakan Pemuda di Kawasan Perbatasan dan Pengajar Muda “Indonesia Mengajar”

Masyarakat yang berada di kawasan perbatasan memiliki masalah yang krusial yakni kemiskinan. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat terutama pemudanya adalah meningkatkan dan memberdayakan diri mereka sendiri untuk bangkit melawan kemiskinan. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat jika ingin keluar dari masalah kemiskinan selain salah satunya adalah mandiri dalam ekonomi serta tidak tergantung dengan pihak lain. Oleh karena itu pemuda harus melakukan beberapa langkah dan strategi untuk mewujudkan impian mereka khususnya dari aspek ekonomi dan pendidikan.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda kawasan perbatasan agar pemuda dapat didayagunakan dalam aktifitas pembangunan setidaknya ada tiga hal :

Pertama, kualitas pemuda. Pemuda harus memiliki kualitas yang bisa menghasilkan karya serta bisa menghasilkan barang dan jasa yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Namun kemampuan untuk menghasilkan karya baik barang maupun jasa tersebut tidak datang dengan sendirinya namun berawal dari

pelatihan, pendidikan dan pembelajaran serta lingkungan yang mendukung, disertai niat tulus ikhlas pemuda untuk memajukan masyarakatnya. Pengajar muda yang sudah dibekali pelatihan bekerjasama dengan pemuda di kawasan perbatasan, memberi semangat kepada anak-anak SD untuk mencari ilmu.

Faktor kedua, jiwa kewirausahaan dan kemandirian seorang pemuda yang diwujudkan dengan kemampuan berinovasi, kemampuan mengorganisir dan mampu menghadapi resiko dari suatu usaha atau bisnis yang dijalankan. Inovasi dalam melahirkan produk baru baik barang maupun jasa akan memberikan kekuatan bagi pemuda dalam menciptakan kemandirian dalam ekonomi.

Faktor ketiga, pemuda harus bisa memperluas modal dan kapital sosial. Definisi kapital sosial dalam berbagai bentuk sudut pandang. Dari dimensi fungsionalis, capital sosial merupakan tindakan kolektif, dari sudut pandang sosiologis merupakan kohesi sosial, secara ekonomi adalah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Intinya pemuda harus bisa memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya dan yang ada di sekitar hidupnya sebagai kekuatan dan modal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemerintah membimbing pemuda untuk memanfaatkan budaya dan keindahan alam kawasan perbatasan, sehingga para wisatawan tertarik mengunjungi kawasan perbatasan tersebut sebagai kawasan wisata.

Simpulan

Pemberdayaan pemuda yang berkarakter Pancasila dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan merupakan suatu langkah awal upaya pembangunan manusia. Pemuda yang memiliki karakter dan potensi yang luar biasa bagi negara ini masih belum diberdayakan dengan baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan secara konprehensif perlu upaya-upaya yang konprehensif juga dari pemerintah dan masyarakat yang didukung oleh sektor swasta. Pemerintah seharusnya menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi pemuda untuk berkembang. Kondisi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu, pemuda dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Dengan berbagai macam pendekatan pemberdayaan yang digunakan dalam meningkatkan kualitas pemuda sebagai terobosan awal untuk meningkatkan sumberdaya manusia secara utuh, diharapkan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan memiliki harapan besar untuk melanjutkan kehidupannya dan menjadi garda terdepan bangsa ini dalam menuju masyarakat yang maju dan mandiri dijiwai nilai-nilai Pancasila. Namun untuk mewujudkan itu semua perlu kerja keras dan kerja sama semua pihak untuk saling bersinergi dan bahu membahu. Kerja keras dan kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan yang jelas akan diperhitungkan oleh negara-negara tetangga.

Daftar Pustaka

- Christenson, James A. & Jerry W. Robinson, 1989, *Community development in perspective*, Iowa: Iowa State University Press.
- Dault, Adhyaksa, 2008. *Pemuda dan Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Sudjito, Gatot, 2015, "Sosialisasi empat pilar di SMAN 1 Karang, Trenggalek, Jawa Timur pada 10/04/2015," (<http://gagasanindonesia.com/gatot-saatnya-melakukan-pembudayaan-pancasila.html>) diunduh tanggal 12 April 2015.
- Hastangka & Ahmad Sidqi, 2014: *Meneropong Realitas Pancasila Masa Kini* (Kumpulan Tulisan Reflektif Mahasiswa S2 Filsafat UGM), Editor, Dr. Armaidy Armawi, Cetakan ketiga, Yogyakarta: PSP Press.
- <http://indonesiamengajar.org/tentang-indonesia-mengajar/visi-dan-misi>
- Iqbal, Andi, 2011. *The Slipping Giant, Potensi dan Permasalahan Kelautan*, Surabaya: Brilliant International.
- Mochamad Yani, Yanyan, 2008, *Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia*. Naskah Lokakarya LEMHANAS RI 11 november 2008
- Moelyarto, V., dan A.M.W. Pranarka. 1996. "Pemberdayaan (*Empowerment*).” Dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, eds. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Ignatius Swart, 2006, *The Churches and the Development Debate: Perspectives on a Fourth Generation Approach*, AFRICAN SUN MeDIA.
- Hasibuan, H. Malayu S.P, 2005, *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta : Bumi Aksara Publisher.
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*, (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh), Surakarta: Citra Islami Press, 1997.
- Sianturi, Eddy MT. dan Nafsiah, SP, 2006, *Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI*. <http://www.kemhan.go.id/kemhan/> akses 3 April 2015
- Sutrisno, Slamet, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006
- Yansen T.P., Soesilo Zauhar, Adri Patton, dan Andy Fefta Wijaya, 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal Di Wilayah Perbatasan Studi tentang Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang*

*Dema) di Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Jurnal Spirit volum 6. N0.2 Tahun 2010.*